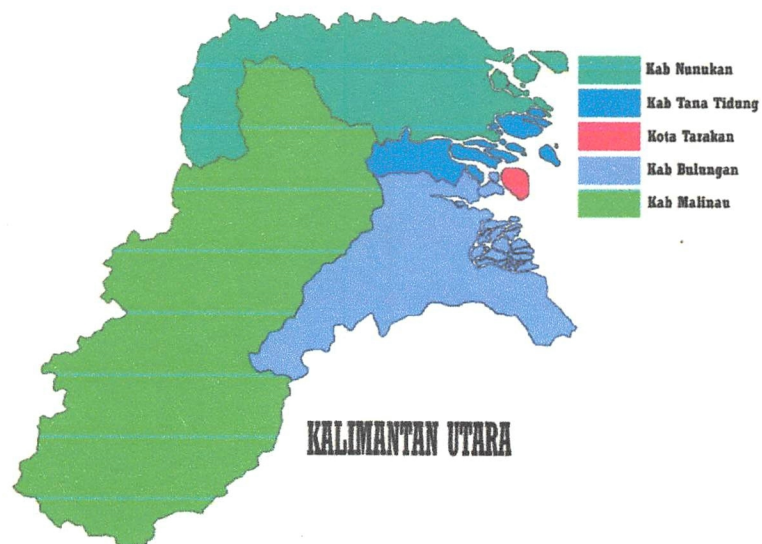




**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
(RENSTRA-P)
TAHUN 2016 – 2021**

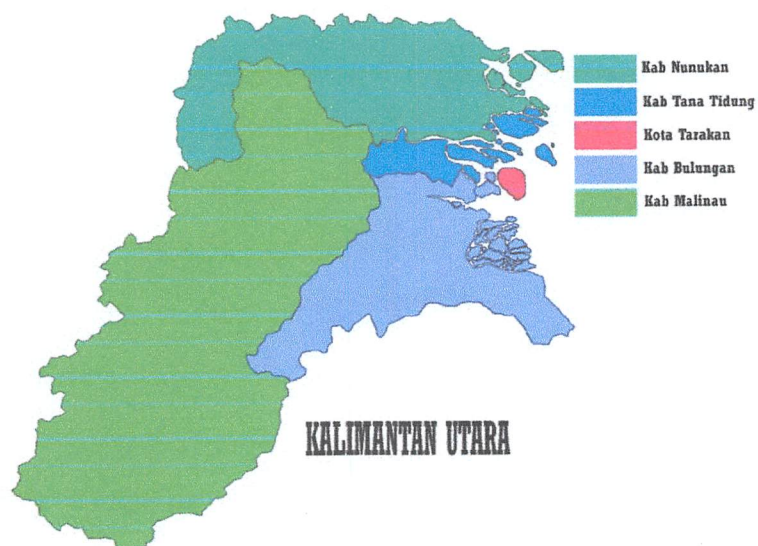


**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

TAHUN 2018



**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
(RENSTRA-P)
TAHUN 2016 – 2021**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

TAHUN 2018



RINGKASAN EKSEKUTIF

Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu instansi pemerintah yang bernaung di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sejak berdirinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dibidang ideologi kebangsaan, politik dalam negeri dan kewaspadaan nasional yang berada di wilayahnya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SISPENAS) dan pasal 272 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 2016 ini adalah merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra tahun 2016-2021 pada era kepemimpinan Kepala Daerah yang baru di Kalimantan Utara, adapun Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA – PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara disusun mengacu pada Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, dan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Tahun 2005 – 2025.

Tanjung Selor, 12 Maret 2018


Kepala

Drs. BASIRAN

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 1969 228 199101 1 001



DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2. Sumber Daya	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	23
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	23
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	27
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	28
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategi.....	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	29
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	29
4.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	29
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	34
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	35
BAB VII PENUTUP	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA - PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan pasal 272 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA - PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara disusun mengacu pada Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang memuat program 5 (lima) tahunan kedepan.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis perangkat daerah merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja yang mengintegrasikan segenap keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara merancang rencana strategis perangkat daerah secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Perumusan rencana strategis perangkat daerah mengikuti tahapan mulai dari idealistik-kualitatif sampai teknis-kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA - PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan



Politik di Provinsi Kalimantan Utara secara bertahap yang dimulai dari tahun pertama 2017 sampai dengan 2021 seiring dengan masa jabatan Gubernur terpilih Kalimantan Utara.

Strategi, arah kebijakan, skenario dan tahapan pembangunan dilingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya dirumuskan secara komprehensif, efektif dan efisien guna menjamin kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan) dan jangka pendek (1 tahunan).

Dengan demikian, Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara ini sangat penting untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan khususnya dalam acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran kedepan.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 171, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2787);
- 3) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 229, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5362);
- 4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);



- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat (ILPPD) kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 42, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2);



- 14) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA - PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang pendanaannya melalui alokasi APBD Provinsi Kalimantan Utara, yang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA - PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman penyusunan renja 5 (lima) tahun kedepan.
2. Menjamin konsistensi antar perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah.
3. Memberikan arahan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021.
4. Menjadi tolak ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara kepada Gubernur atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.



1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian rencana strategis perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 7 (tujuh) Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Bab ini berisi tentang uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara serta kinerja perangkat daerah, data dan informasi.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini berisi tentang uraian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telaahan visi dan misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra Kabupaten/Kota, dan isu strategis perangkat daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tentang uraian tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF



Bab ini berisikan tentang uraian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokasi kegiatan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisikan tentang indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi tentang ringkasan rencana strategis perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dan Langkah-langkah yang akan dilaksanakan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara merupakan bagian Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 pasal 18, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pembinaan idiologi kebangsaan;
- d. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang politik dalam negeri;
- e. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang kewaspadaan nasional;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari pejabat struktural pada bagan struktur organisasi, antara lain:

1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a) Tugas Pokok

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan wewenang untuk memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

b) Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi:

1. Membantu Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.
3. Mengadakan hubungan dengan instansi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2) Sekretaris

a) Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan dan pelaporan, urusan umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perlengkapan serta administrasi keuangan.

b) Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris berfungsi :

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan program dan pelaporan.
2. Melakukan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan.



3. Melakukan penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan barang dan perlengkapan.
4. Melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan.
5. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3) Kepala Bidang Bina Idiologi Kebangsaan

a) Tugas Pokok

Memimpin, melaksanakan tugas Kepala Bidang Bina Ideologi Kebangsaan sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga semua kegiatan yang menjadi tugas Bidang bisa berjalan sesuai dengan acuan yang telah ditentukan dan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

b) Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Bina Idiologi Kebangsaan berfungsi :

1. Melakukan pengarahan penyusunan rencana program Bidang Bina Idiologi Kebangsaan dengan mengarahkan dan memberikan petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
2. Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Bina Idiologi Kebangsaan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
3. Melakukan pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
4. Melakukan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang Bina Idiologi Kebangsaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
5. Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Bina Idiologi Kebangsaan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.



6. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, pihak ketiga agar terjalin kerjasama yang baik untuk pelaksanaan kegiatan.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Ideologi Kebangsaan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang di hadapi serta upaya pemecahannya.
8. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
9. Melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

4) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

a) Tugas Pokok

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, penegakan Peraturan Perundang-Undangan, pemeriksaan dan penindakan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

b) Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri berfungsi:

1. Melakukan pengarahannya penyusunan rencana program Bidang Politik Dalam Negeri dengan mengarahkan dan memberikan petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
2. Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.



3. Melakukan pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan masing-masing.
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi, pemeriksaan, serta mengkaji hasilnya untuk mengetahui tingkat penyelesaian tugas, permasalahan dan upaya pemecahan permasalahannya.
7. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, pihak ketiga agar terjalin kerjasama yang baik untuk pelaksanaan kegiatan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

5) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional

a) Tugas Pokok

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian di bidang kewaspadaan.

b) Fungsi

1. Melakukan penyiapan penyusunan rencana program Bidang Kewaspadaan Nasional berdasarkan peraturan yang berlaku.



2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional berdasarkan Peraturan untuk optimalisasi tugas.
4. Menyiapkan kerangka acuan pelaksanaan operasional berdasarkan standar operasional pelaksanaan pekerjaan.
5. Melakukan pembinaan dan pengendalian, dan pengawasan keberadaan orang, tenaga dan lembaga asing bekerjasama dengan instansi terkait di Kalimantan Utara.
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang di hadapi serta upaya pemecahannya.
7. Melakukan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan dalam menentukan kebijakan.
8. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

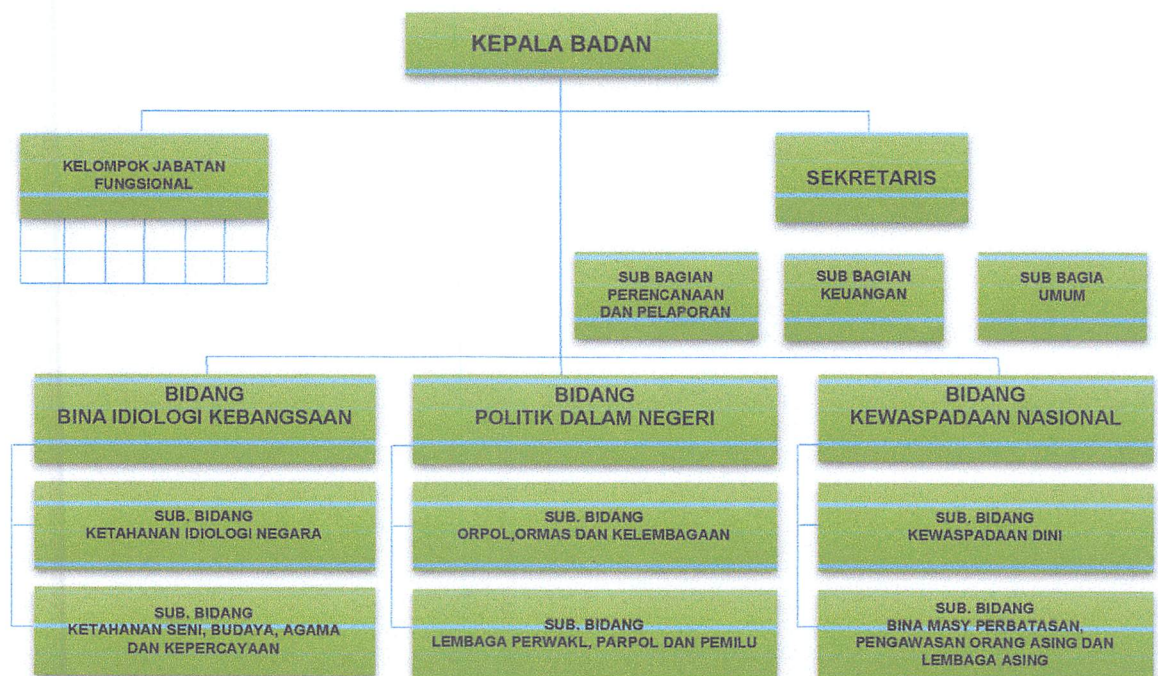
2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di Daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara telah di bentuk melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara tergambar Struktur Organisasi sebagai berikut:



1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Pembinaan Idiologi Kebangsaan
 - a. Sub. Bidang Ketahanan Idiologi Negara
 - b. Sub. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan
4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
 - a. Sub. Bidang Orpol, Ormas dan Kelembagaan
 - b. Sub. Bidang Lembaga perwakilan, Parpol dan Pemilu
5. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
 - a. Sub. Bidang Kewaspadaan Dini
 - b. Sub. Bidang Bina Masyarakat Perbatasan, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing

Tabel 2.1
Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Kalimantan Utara
(Pergub Nomor : 10 Tahun 2014)





2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara

Berbagai akses politik, ekonomi, sosial dan budaya serta ketertiban dan ketenteraman yang dibutuhkan masyarakat Kalimantan Utara kemungkinan tidak akan terwujud apabila perubahan mendasar di bidang pemerintahan sebagai wadah untuk mengekspresikan aspirasi politik tidak memenuhi harapan, disamping itu agenda reformasi yang telah didengungkan sejak 1998 yang lalu akan berjalan dengan menuai harapan dan hasil yang optimal apabila partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dapat terjamin aman/kondusif sehingga disintegrasi di Kalimantan Utara dapat terhindarkan.

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara menurut kualifikasi golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Kondisi Aparatur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kualifikasi Golongan
Per – Desember 2017

NO.	KONDISI SEKARANG			KONDISI YANG DIHARAPKAN			
	GOL.	JENIS KEPEG.	JUMLAH	GOL.	JENIS KEPEG.	JUMLAH	
1.	II	PNS	6	II	PNS	12	
2.	III	PNS	13	III	PNS	29	
3.	IV	PNS	5	IV	PNS	5	
JUMLAH			24	JUMLAH			46

Sumber : Badan Kesbangpol Tahun 2017

Berdasarkan tabel 2.2 di atas terlihat kondisi sekarang Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara menurut golongan masih belum memadai, untuk golongan II berjumlah 6 (enam) orang, golongan III berjumlah 13 (tiga belas) orang dan golongan IV berjumlah 5 (lima) orang, berdasarkan kondisi sumber daya manusia aparatur ini yang ada, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat kekurangan

sumber daya aparatur, dari total kekurangan tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara saat ini telah mengangkat tenaga operator komputer sebanyak 10 (sepuluh) orang dan cleaning service 1 (satu) orang dan penjaga malam/keamanan 2 (dua) orang, sedangkan perbandingan kondisi sumber daya manusia aparatur sekarang dan kondisi yang diharapkan menurut kualifikasi pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kualifikasi Pendidikan Per – Desember 2017

	KONDISI SEKARANG			KONDISI YANG DIHARAPKAN			
NO	PENDIDIKAN	JENIS KEPEG.	JUMLAH	PENDIDIKAN	JENIS KEPEG.	JUMLAH	
1.	SLTA	PNS	6	SLTA	PNS	12	
2.	D III	PNS	2	D III	PNS	8	
3.	S1	PNS	14	S1	PNS	21	
4.	S2	PNS	2	S2	PNS	5	
JUMLAH			24	JUMLAH			46

Sumber : Badan Kesbangpol Tahun 2017

Tabel 2.3 di atas terlihat kondisi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara menurut kualifikasi pendidikan kondisi sekarang masih belum memadai, untuk kualifikasi SLTA sebanyak 6 (enam) orang, D.III sebanyak 2 (dua) orang S.1 berjumlah 14 (empat belas) orang serta S.2 berjumlah 2 (dua) orang, berdasarkan kondisi yang akan datang/yang diharapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara sangat memerlukan sumber daya aparatur mulai SLTA sebanyak 12 (dua belas) orang, D.III berbagai jurusan memerlukan sebanyak 8 (delapan) orang, S.1 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan S.2 diperlukan sebanyak 5 (lima) orang, kekurangan tenaga tersebut amat dibutuhkan segera untuk mengisi tenaga administratif pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dan



juga amat membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualifikasi ahli di bidang manajerial, konsepsional yang memadai.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, sejak diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut dan merupakan tantangan kedepan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menyiapkan sarana dan prasarana terutama sarana dan prasarana fisik gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara masih menyewa (kontrak) sehingga belum memenuhi syarat, sedangkan untuk sarana penunjang lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah cukup memadai, namun sampai saat ini kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi di Kalimantan Utara masih sangat kurang, untuk itu merupakan perhatian yang sangat serius bagi pemerintah daerah terhadap peningkatan kapasitas SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke depan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahlian yang memang sangat dibutuhkan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, adapun data sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel 2.4
Daftar Sarana Dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Utara
Per – Desember 2017

NO	NAMA BARANG	SATUAN/ UNIT	PEROLEHAN/TAHUN	
1	2	3	4	
1.	Toyota Inova	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
2.	Toyota Hilux Type G	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
3.	Toyota Avanza Type G	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013



4.	Honda Blade	3	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
5.	Komputer PC Acer	8	Pengadaan	2013
6.	Laptop Sony Vaio	6	Pengadaan	2013
7.	Komputer all in one	2	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
8.	Laptop HP	2	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
9.	Printer Canon MP 237	5	Pengadaan	2013
10.	Printer LQ 2190	1	Pengadaan	2013
11.	Meja pimpinan	1	Pengadaan	2013
12.	Kursi pimpinan	1	Pengadaan	2013
13.	Meja kerja	30	Pengadaan	2013
14.	Kursi kerja	30	Pengadaan	2013
15.	Sofa Tamu	1	Pengadaan	2013
16.	Meja sekuriti	2	Pengadaan	2013
17.	Lemari Arsip	5	Pengadaan	2013
18.	Toyota Hilux Type V	1	Pengadaan	2014
19.	Toyota Hilux Pick Up	3	Pengadaan	2014
20.	Toyota Rush	4	Pengadaan	2014
21.	Honda Supra X	8	Pengadaan	2014
22.	Honda CBR	4	Pengadaan	2014
23.	Laptop HP	8	Pengadaan	2014
24.	Printer Epson LX 310	3	Pengadaan	2014
25.	Printer Epson L350	6	Pengadaan	2014
26.	Printer Canon LBP 6000	2	Pengadaan	2014
27.	Hardisk 1 TB	4	Pengadaan	2014
28.	Flask disk	7	Pengadaan	2014
29.	Kamera Canon EOS 600D	5	Pengadaan	2014
30.	Handycam Sony	3	Pengadaan	2014
31.	Infokus	5	Pengadaan	2014
32.	Handy Talki	32	Pengadaan	2014
33.	Brangkas	1	Pengadaan	2014
34.	Pemotong Kertas	1	Pengadaan	2014



35.	Felling kabinet	5	Pengadaan	2014
36.	Mesin ketik manual	1	Pengadaan	2014
37.	Laptop	5	Pengadaan	2015
38.	Printer	2	Pengadaan	2015
39.	Printer	10	Pengadaan	2015
40.	Kipas Angin	5	Pengadaan	2015
41.	Exster Hard Disk 2 TB	6	Pengadaan	2015
42.	Flasdis 32 GB Usb 3.0	10	Pengadaan	2015
43.	Mesin Jilid	1	Pengadaan	2015
44.	Mesin Pres	1	Pengadaan	2015
45.	Router	1	Pengadaan	2015
46.	Switch	1	Pengadaan	2015
47.	Kabel Jaringan	1	Pengadaan	2015
48.	Scaner Outomatik	3	Pengadaan	2015
49.	Sepeda Motor Vario	6	Pengadaan	2015
50.	Mobil Toyota Fortuner	1	Pengadaan	2015
51.	AC Mobil dan Tape	3	Pengadaan	2015
52.	Komputer PC	5	Pengadaan	2015
53.	Mesin Foto Copy	1	Pengadaan	2015
54.	Penghisap Debu	1	Pengadaan	2015
55.	Penghitung Uang	1	Pengadaan	2015
56.	Mesin Ginset	1	Pengadaan	2015
57.	Mesin Absensi	1	Pengadaan	2015
58.	Filling Kabinet	5	Pengadaan	2015
59.	UPS	4	Pengadaan	2015
60.	Komputer PC HP	2	Pengadaan	2016
61.	Kursi Hadap	4	Pengadaan	2016
62.	Kursi Tamu	2	Pengadaan	2016
63.	Meja Kerja Kayu/Esl IV	5	Pengadaan	2016
64.	Kursi Kerja Esl IV	7	Pengadaan	2016



65.	Amplifier	1	Pengadaan	2016
66.	Perlengkapan Mic	1	Pengadaan	2016
67.	Speaker	1	Pengadaan	2016
68.	Printer Portable	1	Pengadaan	2016
69.	Mesin Ketik Standar	2	Pengadaan	2016
70.	Lemari Arsip	2	Pengadaan	2016
71.	DVR	1 Unit	Pengadaan	2017
72.	Camera Indoor	10 Unit	Pengadaan	2017
73.	Camera Outdoor	6 Unit	Pengadaan	2017
74.	Cablel CCTV	1 Unit	Pengadaan	2017
75.	Jek BNC	32 Unit	Pengadaan	2017
76.	PSU	1 Unit	Pengadaan	2017
77.	Instalasi dan Asesoris	1 Unit	Pengadaan	2017
78.	Dak Kable 45x40	2 Unit	Pengadaan	2017
79.	TV 32 Inci	1 Unit	Pengadaan	2017

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu 4,5 (empat setengah) tahun semenjak berdirinya Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 22 April 2013 dan terbentuknya perangkat daerah sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 yang ditandai dengan pelantikan pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 10 Juli 2014 bahwa sampai tahun 2016, telah tercapai target kinerja pelayanan, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 - 2016

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- (%)			Realisasi Capaian Tahun ke- (%)			Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)		
			2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Presentase administrasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan	60	55	60	90	55	60	90	100	100	100



2	Presentase tingkat pelanggaran yang terjadi	55	55	50	25	50	46	35	90	92	71,43
3	Indek kepuasan masyarakat terhadap situasi dan kondisi ketertiban, keamanan dan kenyamanan	65	55	60	95	50	55	90	91	92	94,74
4	Presentase kerjasama dengan aparat pencegah kejahatan	60	53	55	85	48	50	90	90	91	92,94
5	Presentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan dan kesadaran berpolitik	70	58	60	75	55	58	70	94	96	93,33

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- (%)	Realisasi Capaian Tahun ke- (%)	Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)
			2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6
1	Presentase unit kerja yang mendapat pelayanan administrasi perkantoran.	100	100	100	100
2	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana.	80	80	80	100
3	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.	60	60	57	95
4	Presentase kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan.	85	85	85	100
5	Persentase masyarakat kaltara yang berwawasan kebangsaan.	75	75	75	100



6	Presentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.	73	73	73	100
---	---	----	----	----	-----

Sedangkan dalam kurun waktu 4 (tahun) tahun terakhir sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 yang ditandai dengan pelantikan pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 10 Juli 2014 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara telah dialokasikan anggaran untuk menunjang pencapaian target kinerja pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Data Alokasi Anggaran dan Realisasi
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2014 - 2016

NO	JENIS BELANJA	2014			2015			2016		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
I.	Belanja Tidak Langsung	4.351.287.500	1.591.803.830	36,58%	4.694.558.758	2.472.995.747	52,68%	5.233.341.522	2.986.952.262	57,08%
	Belanja Pegawai	4.351.287.500	1.591.803.830	36,58%	4.694.558.758	2.472.995.747	52,68%	5.233.341.522	2.986.952.262	57,08%
II.	Belanja Langsung	30.683.791.825	8.627.312.211	28,12%	23.515.904.050	10.035.722.158	42,68%	13.020.541.000	9.179.081.420	70,50%
	- Belanja Pegawai	6.730.700.000	1.290.775.000	19,18%	7.545.750.000	4.132.236.000	54,24%	4.250.480.000	3.495.580.000	82,24%
	- Belanja Barang dan Jasa	15.772.141.825	3.733.521.711	23,67%	14.266.554.050	4.946.597.658	34,67%	8.650.061.000	5.581.861.420	64,53%
	- Belanja Modal	8.180.950.000	3.603.015.500	44,04%	1.703.600.000	956.888.500	56,17%	120.000.000	101.640.000	84,70%
	Jumlah	35.035.079.325	10.219.116.041	29,17%	28.210.462.808	12.508.717.905	44,34%	18.253.882.522	12.166.033.682	66,65%

Tabel 2.8
Data Alokasi Anggaran dan Realisasi
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2017

NO	JENIS BELANJA	2017		
		ANGGARA (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
I.	Belanja Tidak Langsung	4.079.871.826	3.231.234.600	79,20%
	Belanja Pegawai	4.079.871.826	3.231.234.600	79,20%
II.	Belanja Langsung	7.524.692.000	6.795.403.150	90,31%
	- Belanja Pegawai	1.987.400.000	1.929.200.000	97,07%
	- Belanja Barang dan Jasa	5.497.292.000	4.828.220.150	87,83%
	- Belanja Modal	40.000.000	37.963.000	94,96%
	Jumlah	11.604.563.826	10.026.637.750	86,40%

2.3.1. Tantangan dan Peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, sehingga menjadi tujuan migran dari luar pulau Kalimantan Utara diantaranya dari pulau Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Sumatera dan dari daerah sekitarnya disamping itu berbagai macam etnis, dari berbagai macam suku, ini apabila dianalisa maka bermacam-macam pula status sosial, budaya dan ekonomi yang melekat pada masing-masing suku tersebut sehingga berdampak pada permasalahan kependudukan yang sangat kompleks apabila sejak dini tidak dikelola dengan baik sehingga akan mengancam keamanan dan ketertiban umum dimasyarakat Kalimantan Utara, adapun peluang dan tantangan yang dihadapi oleh badan kesbangpol sebagai berikut:



a. Tantangan

1. Disintegrasi bangsa dikarenakan sebagian besar wilayah Kalimantan Utara merupakan daerah pedalaman dan perbatasan.
2. Tuntutan kebutuhan dan harapan akan masyarakat Indonesia baru yang ditandai dengan iklim demokratis dan keterbukaan, belum dapat diikuti sama cepatnya dengan nilai-nilai dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.
3. Adanya kecenderungan sikap tidak menghargai orang lain, menyampaikan keinginan dan harapan cenderung yang sebebas-bebasnya.
4. Adanya kecenderungan unjuk rasa yang disertai kekerasan, intimidasi, perebutan kekuasaan politik nasional dan daerah.
5. Adanya kecenderungan pengambilan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang tidak responsif dan belum sepenuhnya transparan.

b. Peluang

1. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif dalam upaya ikut mewujudkan rasa ketenteraman dan kenyamanan di Kalimantan Utara.
2. Kemudahan memperoleh akses informasi secara dini.
3. Dukungan orpol, ormas dan kelembagaan lainnya dalam menciptakan kondisi yang kondusif sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman di Kalimantan Utara.
4. Dukungan dari pemerintah daerah atas perumusan, perencanaan, pembinaan serta kebijakan guna mendukung pengembangan kapasitas aparatur cukup memadai.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan yang saat ini berkembang sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah:

1. Menurunnya rasa nasionalisme dikalangan masyarakat.
2. Masih kurangnya wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.
4. Isu sara sering menjadi pemicu konflik sosial

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

Visi ***“Berpadu dalam kemajemukan untuk mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman dan Damai, dengan didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”***.

Diformulasikan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi daerah dan permasalahan mendasar serta isu strategis yang terjadi di Kalimantan Utara.

Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan terdepan merupakan upaya optimal yang dilakukan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan provinsi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat terbaik yang berada di wilayah perbatasan. Sebagai wilayah perbatasan terdepan Provinsi Kalimantan Utara merupakan pintu gerbang, penjaga keutuhan, kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melambangkan kemakmuran bangsa Indonesia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang ingin dicapai kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan dan pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, berdaulat, sejahtera dan berkelanjutan. Sebagai wilayah perbatasan terdepan melambangkan tingkat kemajuan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan



Utara, khususnya. Pendekatan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan.

Sebagai wujud dari wilayah perbatasan terdepan ditandai dengan tingginya aksesibilitas wilayah yang mendukung konektivitas antar wilayah, khususnya dengan pusat pemerintahan, pusat pelayanan publik dan wilayah lain yang relatif lebih maju; serta terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana wilayah melalui pembangunan infrastruktur sebagai pendukung terciptanya keseimbangan dengan wilayah perbatasan negara tetangga. Pengembangan perbatasan yang maju akan mengurangi beban pemerintah pusat karena warga yang sejahtera di perbatasan akan membantu menjaga kehormatan NKRI, termasuk dalam penyelesaian kejelasan tapal batas dengan negara tetangga. Hal ini akan mendukung kehormatan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang menjaga wilayah perbatasan dengan menunjukkan kondisi yang melambangkan kondisi Indonesia seluruhnya yang baik dan sejahtera.

Dalam perencanaan pembangunan Kalimantan Utara realitasnya masih memiliki beberapa permasalahan-permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan. Permasalahan itu adalah kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing.

b. Misi

Pembangunan Kalimantan Utara 2016-2021 mengemban visi yang harus direalisasikan adalah ***"Berpadu dalam kemajemukan untuk mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman dan Damai, dengan didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa"*** yang diwujudkan melalui sinergi tiga pokok visi yaitu : (1) Visi Mandiri, (2) Visi Aman dan Damai, (3) Visi Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

Sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, maka analisis terhadap misi Kepala Daerah Terpilih diarahkan pada misi ke 2 (Dua): Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai dan misi ke 3 (Tiga): Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa, telaahan terhadap misi 2 dan 3 adalah sebagai berikut :



1) Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai

Misi yang kedua, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai, secara umum mengandung arti terciptanya kondisi yang ~~menenteramkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka~~ sehari-hari tanpa terganggunya kondisi keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah provinsi.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait keamanan dan kedamaian wilayah yang selama lima tahun mendatang harus tercapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai antara lain: menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan keamanan memang merupakan tugas dari pemerintah pusat, namun tanpa mengesampingkan ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan perlu diciptakan karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat setempat. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mendukung penciptaan suasana aman dan damai ini sesuai dengan peran seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.

Bagian dari misi untuk menjaga kedaulatan negara diarahkan untuk daerah perbatasan dan wilayah secara keseluruhan.

Di perbatasan diupayakan untuk mendukung kemudahan terjaganya keutuhan NKRI sedangkan di wilayah keseluruhan diarahkan untuk menjaga keamanan secara umum. Sedangkan bagian dari misi untuk membangun perbatasan yang aman diarahkan untuk mewujudkan daerah perbatasan yang tertib dan tenteram.

Bagian dari misi untuk mewujudkan penegakan hukum diarahkan pada upaya untuk mewujudkan penegakan hukum dengan cara menyiapkan berbagai ketentuan untuk menjadi dasar penegakan hukum dan melakukan berbagai implementasi ketentuan tersebut di kegiatan nyata di lapangan. Adapun faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi badan kesbangpol terkait dengan misi kedua adalah:



a) Faktor pendorong adalah peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat, agama, adat dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif.

b) Faktor penghambat:

1. Masih rendahnya pemahaman hukum dikalangan masyarakat.
2. Masih rendahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan.

2) Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa

Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa, secara umum mengandung arti mengupayakan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun ke depan. Secara khusus misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih dan berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta mewujudkan pemerintahan akuntabel.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pelayanan publik yang prima diarahkan pada penguatan suasana pemerintahan yang menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik, upaya terwujudnya pelayanan perizinan yang selalu meningkatkan pelayanan kependudukan. Adapun faktor pendorong dan



penghambat yang dihadapi badan kesbangpol terkait dengan misi ketiga adalah:

- a) Faktor pendorong adanya kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas aparatur.
- b) Faktor penghambat adalah strategi, kebijakan dan peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan sehingga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan dilapangan.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Kementrian Dalam Negeri

Sejak reformasi tahun 1998 keberhasilan penyelesaian konflik dan kesepakatan damai atas konflik di tanah air, keberhasilan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, hanya saja potensi konflik karena berbagai sebab masih cukup besar ancamannya bagi persatuan Indonesia, oleh karena itu pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa menjadi suatu keniscayaan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas persatuan dan kesatuan nasional.

a. Permasalahan dan isu strategis

1. Pembangunan birokrasi dan tata kelola yang baik.
2. Penataan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berdaya saing.
3. Revitalisasi pendidikan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
4. Pembenahan sistem hukum yang berkeadilan.
5. Pemantapan sistem keamanan dan ketertiban dalam negeri.
6. Pembenahan kehidupan berdemokrasi.
7. Reaktualisasi nilai-nilai budaya nasional dan lokal yang menguatkan karakter bangsa.



Tabel 3.1
Telaahan Rencana strategi Kementerian Dalam Negeri RI

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra 2019
1	2	3	4
Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa	Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa	Persentase penurunan angka potensi kerawanan konflik sosial yang berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)	0 %

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara diketahui bahwa tidak bersinggungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka tidak disertakan /disajikan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS).

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam menyusun Rencana Strategis untuk kurun 5 tahun mendatang telah ditetapkan 3 (Tiga) isu yang menjadi perhatian Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemahaman terhadap rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.
3. Isu sara sering menjadi pemicu konflik sosial.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah meningkatkan wawasan kebangsaan dan karakter masyarakat dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta memberikan pendidikan politik yang sehat dan demokratis.

b. Sasaran

Sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah meningkatnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial serta pemahaman masyarakat dalam berbangsa dan bernegara melalui politik.

Tabel 4.1
Review Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Tahun 2012 - 2016

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa.	Meningkatnya rasa toleransi dimasyarakat dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.	Meningkatnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan.	Persentase penurunan angka potensi kerawanan konflik sosial yang berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).	-	25	22	20	18
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik yang sehat dan demokratis.	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam partisipasi pembangunan dibidang politik.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara melalui politik.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada.	-	62	65	68	70



Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Tahun 2016 - 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa.	Meningkatnya rasa toleransi dimasyarakat dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.	Meningkatnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan.	Persentase penurunan angka potensi kerawanan konflik sosial yang berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).	16	14	12	10	5
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik yang sehat dan demokratis.	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam partisipasi pembangunan dibidang politik.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berrbangsa dan bernegara melaui politik.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilukada.	73	76	79	82	85

4.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

4.2.1. Analisa Lingkungan Internal

Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara di masa yang akan datang tidak dapat terelakan dari pengaruh faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan yang ada pada organisasi, oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperbesar peranan kekuatan dan memperkecil kelemahan mengingat begitu kompleksnya variabel yang berkaitan dengan faktor internal.

a. Kekuatan

1. Perumusan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.
2. Sarana dan parasana pendukung kinerja organisasi cukup memadai.
3. Sumber daya aparatur memiliki kemauan untuk berkembang.



b. Kelemahan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi berpolitik.
2. Isu SARA sering menjadi pemicu konflik sosial
3. Kuantitas dan kualitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara yang belum memadai.
4. Hubungan hirarki antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota yang kurang jelas.

4.2.2. Analisa Lingkungan Eksternal

Berbagai usaha untuk memanfaatkan faktor eksternal berupa peluang yang muncul perlu dilakukan disamping memperkecil dampak yang ditimbulkan dari ancaman, atas dasar itu, maka dapat diidentifikasi peluang dan ancaman yang berdampak luas terhadap pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

a. Peluang

1. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif dalam upaya ikut mewujudkan rasa ketenteraman dan kenyamanan di Kalimantan Utara.
2. Kemudahan memperoleh akses informasi secara dini.
3. Dukungan orpol, ormas dan kelembagaan lainnya dalam menciptakan kondisi yang kondusif sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman di Kalimantan Utara.
4. Dukungan dari pemerintah daerah atas perumusan, perencanaan, pembinaan serta kebijakan guna mendukung pengembangan kapasitas aparatur cukup memadai.
5. Melakukan sosialisasi tentang pendidikan politik yang sehat dan demokratis dikalangan masyarakat.



b. Tantangan

1. Disintegrasi bangsa dikarenakan sebagian besar wilayah Kalimantan Utara merupakan daerah pedalaman dan perbatasan.
2. Tuntutan kebutuhan dan harapan akan masyarakat Indonesia baru yang ditandai dengan iklim demokratis dan keterbukaan, belum dapat diikuti sama cepatnya dengan nilai-nilai dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.
3. Adanya kecenderungan sikap tidak menghargai orang lain, menyampaikan keinginan dan harapan cenderung yang sebebas-bebasnya.
4. Adanya kecenderungan unjuk rasa yang disertai kekerasan, intimidasi, perebutan kekuasaan politik nasional dan daerah.
5. Adanya kecenderungan pengambilan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang tidak responsif dan belum sepenuhnya transparan.
6. Kondisi geografi dan demografi yang luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata.
7. Kondisi akses jalan yang belum memadai dan biaya transportasi yang mahal.

Tabel 4.3
Analisis Strategik Dengan Faktor SWOT

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI) ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE)	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	1. Perumusan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan RPJMD. 2. Sarana dan sarana pendukung kinerja cukup memadai. 3. Sumber daya aparatur memiliki kemauan untuk berkembang.	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi berpolitik. 2. Isu SARA sering menjadi pemicu konflik sosial 3. Kuantitas dan kualitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara yang belum memadai. 4. Hubungan hierarki antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota yang kurang jelas.
PELUANG (O)	S + O	O + W



1. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif dalam upaya ikut mewujudkan rasa ketenteraman dan kenyamanan di Kalimantan Utara. 2. Kemudahan memperoleh akses informasi secara dini. 3. Dukungan orpol, ormas dan kelembagaan lainnya dalam menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman di Kalimantan Utara. 4. Dukungan dari pemerintah daerah atas perumusan, perencanaan, pembinaan serta kebijakan guna mendukung pengembangan kapasitas aparatur cukup memadai. 5. Melakukan sosialisasi tentang pendidikan politik yang sehat dan demokratis dikalangan masyarakat.	1. Melakukan optimalisasi dengan pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia dengan ilmu pengetahuan yang ada. 2. Memacu peluang kerja-sama dalam segala bidang dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas. 3. Sosialisasi dan membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).	
ANCAMAN/HAMBATAN (T)	S + T	W + T
1. Ancaman disintegrasi bangsa karena sebagian besar wilayah provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah pedalaman dan perbatasan. 2. Tuntutan kebutuhan dan harapan akan masyarakat Indonesia baru yang ditandai dengan iklim demokratis dan keterbukaan belum dapat diikuti sama cepatnya dengan nilai-nilai dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. 3. Berkembangnya iklim tidak menghargai orang lain, menyampaikan keinginan dan harapan cenderung yang sebebas-bebasnya. 4. Unjuk rasa yang disertai kekerasan, intimidasi, perebutan kekuasaan politik nasional dan daerah. 5. Pengambilan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang tidak responsif dan belum sepenuhnya transparan. 6. Kondisi geografi dan demografi yang luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata. 7. Kondisi akses jalan yang belum memadai dan biaya transportasi yang mahal.	1. Peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial. 2. Menyusun strategi kebijakan untuk memacu kegiatan dalam pelaksanaan tugas. 3. Meningkatkan hubungan komunikasi yg efektif antara pemerintah dan masyarakat 4. Meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. 5. Menciptakan pembangunan sumberdaya manusia dengan berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur. 6. Meningkatkan kerja sama dengan tokoh masyarakat, ormas, orpol dan kelembagaan lainnya dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara melalui politik.	1. Terbentuknya keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan pembangunan. 2. Meningkatkan kewaspadaan dimasyarakat terhadap ancaman baik dari dalam atau luar. 3. Menegakkan kepastian hukum guna menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dilingkungan masyarakat. 4. Terlaksananya penyelesaian masalah konflik secara arif & bijaksana dengan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang ada. 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.



a. Strategi:

1. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, maka ditetapkan strategi yang akan dilakukan adalah peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui politik yang sehat dan demokratis.

b. Kebijakan:

1. Dalam upaya mendukung strategi tersebut, maka kebijakan yang ditempuh adalah mengadakan penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dan pentingnya partisipasi dalam kehidupan berpolitik serta membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam upaya mencapai tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai acuan untuk mendukung tugas dan fungsi dalam upaya mewujudkan keamanan, ketentraman serta kenyamanan dilingkungan masyarakat melalui peningkatan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum dan keamanan serta intelijen daerah dalam upaya pencegahan dini terjadinya konflik sosial, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara merumuskan jenis program dan kegiatan yang akan ditempuh adalah :

(Lihat lampiran : Tabel 5.1 dan 5.2)



BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang, adapun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu
Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD 2016 – 2021

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase angka potensi kerawanan konflik sosial yang berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).	48	46	44	42	40	35	35
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada.	70	73	76	79	82	85	85



Tabel 6.2
Indikator Kinerja Program/Autcome SKPD
Tahun 2016 - 2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM PADA TAHUN KE-				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	80	85	90	95	100
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60	70	80	90	100
4	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan	85	88	91	94	97
5	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat kaltara yang berwawasan kebangsaan	75	80	85	90	95
6	Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik	73	76	79	82	85



BAB VII PENUTUP

Dalam upaya mencapai keadaan/situasi dan kondisi masyarakat Kalimantan Utara yang aman, nyaman, tentram, tertib dan damai, maka itu bukan semata-mata tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, tetapi diharapkan peran serta seluruh organisasi baik pemerintah maupun swasta, elemen masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara serta menjaga ketenteraman dan ketertiban dan kenyamanan di daerah Kalimantan Utara.

Disamping melakukan cara/langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu kiranya diperhatikan faktor kunci keberhasilan yang antara lain :

1. Adanya komitmen pemerintah dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan Renstra dengan sepenuh hati, daya, dan upaya yang maksimal dan konsisten.
2. Adanya dokumen yang merinci Renstra ini dalam program tahunan yang dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Utara.
3. Adanya pembagian tugas yang jelas kepada aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Adanya sumber-sumber pembiayaan yang memadai.
5. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang, sektor, program dan kegiatan pembangunan yang ada, baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan elemen masyarakat lainnya.
6. Adanya konsistensi antara Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara.



**TIM PENYUSUN
PERUBAHAN PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA - PD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2016 – 2021**

PENANGGUNG JAWAB	:	Drs. BASIRAN
KETUA	:	TAPIP PURNOMO, SH
SEKRETARIS	:	KASIYONO
ANGGOTA	:	1. HENDRA SAPUTRA, SE
		2. AYOP CAHYONO, SE
		3. SADRIANSYAH, S.IP
		4. JAMALUDDIN, SE, M.Pd
		5. ZAINUDDIN D, S.Pd
		6. ROHANI
SEKRETARIAT	:	1. EDWIN FITRIO, S. Kom
		2. FAJAR, S. Sos
		3. VICTOR SUCIPTO RB, A.Md
		4. VIVIA NIRMALA CITTA



LAMPIRAN

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2017;

5.2 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2018-2021;

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TUJUK KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PEMANGKUNG JAWAB	LOKASI	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		KIPDUS KINERJA PADA ASPEK PERIODIK BERTIBA CINA				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Terdapatnya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Terdapatnya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Adanya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Pelaksanaan <i>admission</i> pemerintahan	Pemantauan <i>anti-bribe</i> yang terintegrasi dengan pelaksanaan <i>admission</i> pemerintahan	70%	70%	2.367.997,000													
			Persediaan jasa umum masyarakat	Jumlah surat permohonan yang diterima	600 Surat	600 Surat	7,000,000													
			Persediaan jasa kesehatan, sumber daya air dan lingkungan	Jumlah bahan penyediaan jasa kesehatan, sumber daya air dan lingkungan	12 Bulan	12 Bulan	37,680,000													
			Persediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah persediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	954,900,000													
			Persediaan jasa kesehatan	Jumlah bahan penyediaan jasa kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	16,000,000													
			Persediaan jasa pelayanan kesehatan	Jumlah persediaan dan persediaan yang diterima	25 Unit	25 Unit	10,000,000													
			Persediaan jasa kesehatan	Jumlah bahan penyediaan jasa kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	84,017,000													
			Persediaan barang kesehatan dan pengendalian	Jumlah bahan penyediaan barang kesehatan dan pengendalian	12 Bulan	12 Bulan	79,000,000													
			Persediaan kesehatan dan lingkungan	Jumlah bahan penyediaan kesehatan dan lingkungan	12 Bulan	1 Unit	10,000,000													
			Persediaan kesehatan dan lingkungan	Jumlah persediaan kesehatan dan lingkungan	5 Unit	5 Unit	45,000,000													
			Persediaan kesehatan dan lingkungan	Jumlah persediaan kesehatan dan lingkungan	2160 Eksemplar	2160 Eksemplar	27,000,000													
			Persediaan kesehatan dan lingkungan	Jumlah persediaan kesehatan dan lingkungan	4000 Porti	4,000 Porti	91,500,000													
			Persediaan kesehatan dan lingkungan	Jumlah persediaan kesehatan dan lingkungan	60 Kali	60 Kali	556,500,000													
			Persediaan kesehatan dan lingkungan	Jumlah persediaan kesehatan dan lingkungan	90 Kali	90 Kali	350,000,000													
Terdapatnya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Terdapatnya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Adanya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Pelaksanaan <i>admission</i> pemerintahan	Pemantauan <i>anti-bribe</i> yang terintegrasi dengan pelaksanaan <i>admission</i> pemerintahan	70%	80%	418,000,000													
			Persediaan jasa umum masyarakat	Jumlah surat permohonan yang diterima	1 Unit	1 Unit	120,000,000													
			Persediaan jasa kesehatan, sumber daya air dan lingkungan	Jumlah bahan penyediaan jasa kesehatan, sumber daya air dan lingkungan	33 Unit	33 Unit	298,000,000													
			Persediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah persediaan jasa administrasi keuangan	-	-	-													
Terdapatnya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Terdapatnya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Adanya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Pelaksanaan <i>admission</i> pemerintahan	Pemantauan <i>anti-bribe</i> yang terintegrasi dengan pelaksanaan <i>admission</i> pemerintahan	70%	-	-													
			Persediaan jasa umum masyarakat	Jumlah surat permohonan yang diterima	-	-	-													
			Persediaan jasa kesehatan, sumber daya air dan lingkungan	Jumlah bahan penyediaan jasa kesehatan, sumber daya air dan lingkungan	-	-	-													
			Persediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah persediaan jasa administrasi keuangan	-	-	-													
Terdapatnya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Terdapatnya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Adanya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Pelaksanaan <i>admission</i> pemerintahan	Pemantauan <i>anti-bribe</i> yang terintegrasi dengan pelaksanaan <i>admission</i> pemerintahan	70%	80%	393,020,000													
			Persediaan jasa umum masyarakat	Jumlah surat permohonan yang diterima	27 Orang	27 Orang	150,000,000													
			Persediaan jasa kesehatan, sumber daya air dan lingkungan	Jumlah bahan penyediaan jasa kesehatan, sumber daya air dan lingkungan	500 Orang	500 Orang	243,020,000													
			Persediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah persediaan jasa administrasi keuangan	-	-	-													
Terdapatnya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Terdapatnya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Adanya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Pelaksanaan <i>admission</i> pemerintahan	Pemantauan <i>anti-bribe</i> yang terintegrasi dengan pelaksanaan <i>admission</i> pemerintahan	70%	90%	1,147,630,000													
			Persediaan jasa umum masyarakat	Jumlah surat permohonan yang diterima	5 Kegiatan	5 Kegiatan	654,100,000													
			Persediaan jasa kesehatan, sumber daya air dan lingkungan	Jumlah bahan penyediaan jasa kesehatan, sumber daya air dan lingkungan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	493,550,000													
			Persediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah persediaan jasa administrasi keuangan	-	-	-													
Terdapatnya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Terdapatnya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Adanya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Pelaksanaan <i>admission</i> pemerintahan	Pemantauan <i>anti-bribe</i> yang terintegrasi dengan pelaksanaan <i>admission</i> pemerintahan	70%	-	-													
			Persediaan jasa umum masyarakat	Jumlah surat permohonan yang diterima	-	-	-													
			Persediaan jasa kesehatan, sumber daya air dan lingkungan	Jumlah bahan penyediaan jasa kesehatan, sumber daya air dan lingkungan	-	-	-													
			Persediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah persediaan jasa administrasi keuangan	-	-	-													
Terdapatnya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Terdapatnya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Adanya transparansi pelayanan publik dan keterbacaan anggaran dan politik	Pelaksanaan <i>admission</i> pemerintahan	Pemantauan <i>anti-bribe</i> yang terintegrasi dengan pelaksanaan <i>admission</i> pemerintahan	70%	30%	424,375,000													
			Persediaan jasa umum masyarakat	Jumlah surat permohonan yang diterima	2 Kegiatan	2 Kegiatan	334,375,000													
			Persediaan jasa kesehatan, sumber daya air dan lingkungan	Jumlah bahan penyediaan jasa kesehatan, sumber daya air dan lingkungan	2 Laporan	2 Laporan	90,000,000													
			Persediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah persediaan jasa administrasi keuangan	-	-	-													

Aktivitas pelaksanaan rencana tahunan atau siklus kerja kelompok dan pimpinan	Terdapatnya hasil tahunan atau siklus kerja kelompok dan pimpinan	Program pengempokan kawasan kelurahan	Pemerintah masyarakat, halawa yang berorientasi kelurahan ini	70%	75%	678.250,000								Bid. Ideologi
		Peningkatan kesadaran akan hak-hak dalam kehidupan beragama	Jumlah rapat pengurus di tingkat FKUB dengan tokoh agama dan masyarakat	1 Kegiatan	1 Panel	153.100,000								Bid. Ideologi
		Peningkatan rasa solidaritas dan keadilan sosial dibagikan masyarakat	Jumlah kegiatan Prangkoan rasa solidaritas dan keadilan sosial	3 Kegiatan	3 Panel	325.150,000								Bid. Ideologi
		Peningkatan kesadaran akan masalah lain selain ibadah beragama	Jumlah kegiatan Prangkoan kesadaran masyarakat akan masalah lain selain ibadah beragama	-	-	-								Bid. Ideologi
Tenaga pemuda wawasan kebangsaan di masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai	Meningkatnya kesadaran akan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila	Program Pendidikan Penguatan Wawasan Kebangsaan	Penerapan belajar baru dengan metode pembelajaran dalam meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan	70%	75%	533.400,000								Bid. Ideologi
		Fasilitasi pertemuan bulanan dan berbagai forum kebangsaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah rapat forum penguatan wawasan kebangsaan (PKK)	1 Kali	1 Kali	295.200,000								Bid. Ideologi
		Sosialisasi nilai-nilai, budaya, pengetahuan wawasan kebangsaan	Jumlah seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan wawasan kebangsaan	2 Kali	2 Kali	137.100,000								Bid. Ideologi
Tenaga pemuda pendidikan politik di masyarakat yang aktif dan demokratis	Meningkatnya kesadaran berpolitik yang etnis dan demokratis di masyarakat	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Penerapan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik	70%	75%	1.673.000,000								Bid. Politik
		Penyediaan kepada masyarakat	Jumlah penyuluhan politik di partai politik	2 Kali	2 Kali	652.600,000								Bid. Politik
		Fasilitasi penyusunan program partai politik	Jumlah fasilitasi penyusunan partai politik	1 Kali	1 Kali	472.000,000								Bid. Politik
		Koordinasi forum diskusi dan forum politik	Jumlah koordinasi diskusi forum-forum diskusi politik	-	-	-								Bid. Politik
		Penyusunan dana desa partipolitik, ormas, LSM dan lembaga adat	Jumlah laporan dan hasil penyusunan LSM dan lembaga adat	-	-	-								Bid. Politik
		Melakukan evaluasi dan asesmen	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	1 Laporan	1 Laporan	546.400,000								Bid. Politik
		Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah	-	-	-								Bid. Politik
JUMLAH						7.524.692,000								

Tabel 5.2

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIOD PENYERTA SKPD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Terwujudnya kemampuan pelayanan administrasi pemerintahan dalam lingkup badan kesatuan bangsa dan politik	Terwujudnya kemampuan pelayanan administrasi pemerintahan dalam lingkup badan kesatuan bangsa dan politik	Adanya tercapainya pelayanan administrasi pemerintahan dalam lingkup badan kesatuan bangsa dan politik	Pelayanan administrasi pemerintahan	Pelayanan unit kerja yang melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan	100%	100%	2.914.200,634	100%	2.914.200,634	100%	2.914.200,634	100%	2.914.200,634	100%	2.914.200,634	100%	2.914.200,634	
			Penyediaan jasa st. al. masyarakat	Jumlah surat menyurat yang dikirim	600 Surat	600 Surat	6.000,000	600 Surat	6.000,000	600 Surat	6.000,000	600 Surat	6.000,000	600 Surat	6.000,000	3000 Surat	3.150,000	Sekretariat
			Penyediaan jasa ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sala. penyediaan jasa listrik, air, telepon, internet	12 Bulan	12 Bulan	78.700,000	12 Bulan	78.700,000	12 Bulan	78.700,000	12 Bulan	78.700,000	12 Bulan	78.700,000	60 Bulan	28.100,000	Sekretariat
			Penyediaan jasa ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sala. penyediaan jasa administrasi pemerintahan	12 Bulan	12 Bulan	926.600,000	12 Bulan	926.600,000	12 Bulan	926.600,000	12 Bulan	926.600,000	12 Bulan	926.600,000	60 Bulan	4.901.300,000	Sekretariat
			Penyediaan jasa ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sala. penyediaan jasa kebersihan kantor yang dibelikan	12 Bulan	12 Bulan	14.200,000	12 Bulan	14.200,000	12 Bulan	14.200,000	12 Bulan	14.200,000	12 Bulan	14.200,000	60 Bulan	100.600,000	Sekretariat
			Penyediaan jasa ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sala. penyediaan jasa kebersihan kantor yang dibelikan	25 Unit	25 Unit	12.000,000	25 Unit	12.000,000	25 Unit	12.000,000	25 Unit	12.000,000	25 Unit	12.000,000	25 Unit	60.000,000	Sekretariat
			Penyediaan jasa ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sala. penyediaan jasa kebersihan kantor yang dibelikan	12 Bulan	12 Bulan	89.270,634	12 Bulan	89.270,634	12 Bulan	89.270,634	12 Bulan	89.270,634	12 Bulan	89.270,634	60 Bulan	417.387,634	Sekretariat
			Penyediaan jasa ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sala. penyediaan barang cetakan dan pengemasan	12 Bulan	12 Bulan	78.000,000	12 Bulan	78.000,000	12 Bulan	78.000,000	12 Bulan	78.000,000	12 Bulan	78.000,000	60 Bulan	337.000,000	Sekretariat
			Penyediaan jasa ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sala. penyediaan komputer, alat tulis, minuman	12 Bulan	12 Bulan	6.000,000	12 Bulan	6.000,000	12 Bulan	6.000,000	12 Bulan	6.000,000	12 Bulan	6.000,000	60 Bulan	40.000,000	Sekretariat
			Penyediaan jasa ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sala. penyediaan dan perlengkapan kantor	5 Unit	5 Unit	13.500,000	5 Unit	13.500,000	5 Unit	13.500,000	5 Unit	13.500,000	5 Unit	13.500,000	25 Unit	227.000,000	Sekretariat
			Penyediaan jasa ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sala. penyediaan rumah tangga kantor yang dibelikan	-	2 Jenis	3.120,000	2 Jenis	3.120,000	2 Jenis	3.120,000	2 Jenis	3.120,000	2 Jenis	3.120,000	2 Jenis	47.914,599	Sekretariat
			Penyediaan jasa ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sala. penyediaan buku, majalah, koran	2160 Eksemplar	2160 Eksemplar	16.800,000	2160 Eksemplar	16.800,000	2160 Eksemplar	16.800,000	2160 Eksemplar	16.800,000	2160 Eksemplar	16.800,000	10800 Eksemplar	108.000,000	Sekretariat
Penyediaan jasa ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sala. penyediaan minuman	4000 Porsi	4000 Porsi	85.200,000	4000 Porsi	85.200,000	4000 Porsi	85.200,000	4000 Porsi	85.200,000	4000 Porsi	85.200,000	20500 Porsi	417.300,000	Sekretariat			
Penyediaan jasa ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sala. penyediaan kesehatan	60 Kali	60 Kali	700.000,000	60 Kali	700.000,000	60 Kali	700.000,000	60 Kali	700.000,000	60 Kali	700.000,000	300 Kali	2.111.082,944	Sekretariat			
Penyediaan jasa ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sala. penyediaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	90 Kali	140 Kali	305.500,000	140 Kali	305.500,000	140 Kali	305.500,000	140 Kali	305.500,000	140 Kali	305.500,000	650 Kali	2.361.096,616	Sekretariat			
Terwujudnya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Meningkatnya kinerja aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Pelayanan publik umum ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	80%	85%	422.810,000	96%	378.000,000	95%	367.000,000	100%	378.000,000	100%	2.087.000,000	Sekretariat		
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	1 Unit	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	850.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	33 Unit	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	1.237.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	Sekretariat
Terwujudnya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Meningkatnya kinerja aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Pelayanan publik umum ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	80%	85%	422.810,000	96%	378.000,000	95%	367.000,000	100%	378.000,000	100%	2.087.000,000	Sekretariat		
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	1 Unit	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	850.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	33 Unit	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	1.237.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	Sekretariat
Terwujudnya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Meningkatnya kinerja aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Pelayanan publik umum ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	80%	85%	422.810,000	96%	378.000,000	95%	367.000,000	100%	378.000,000	100%	2.087.000,000	Sekretariat		
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	1 Unit	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	850.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	33 Unit	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	1.237.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	Sekretariat
Terwujudnya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Meningkatnya kinerja aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Pelayanan publik umum ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	80%	85%	422.810,000	96%	378.000,000	95%	367.000,000	100%	378.000,000	100%	2.087.000,000	Sekretariat		
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	1 Unit	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	850.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	33 Unit	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	1.237.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	Sekretariat
Terwujudnya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Meningkatnya kinerja aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Pelayanan publik umum ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	80%	85%	422.810,000	96%	378.000,000	95%	367.000,000	100%	378.000,000	100%	2.087.000,000	Sekretariat		
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	1 Unit	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	850.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	33 Unit	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	1.237.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	Sekretariat
Terwujudnya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Meningkatnya kinerja aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Pelayanan publik umum ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	80%	85%	422.810,000	96%	378.000,000	95%	367.000,000	100%	378.000,000	100%	2.087.000,000	Sekretariat		
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	1 Unit	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	850.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	33 Unit	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	1.237.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	Sekretariat
Terwujudnya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Meningkatnya kinerja aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Pelayanan publik umum ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	80%	85%	422.810,000	96%	378.000,000	95%	367.000,000	100%	378.000,000	100%	2.087.000,000	Sekretariat		
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	1 Unit	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	850.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	33 Unit	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	1.237.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	Sekretariat
Terwujudnya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Meningkatnya kinerja aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Pelayanan publik umum ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	80%	85%	422.810,000	96%	378.000,000	95%	367.000,000	100%	378.000,000	100%	2.087.000,000	Sekretariat		
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	1 Unit	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	850.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	33 Unit	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	1.237.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	Sekretariat
Terwujudnya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Meningkatnya kinerja aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Pelayanan publik umum ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	80%	85%	422.810,000	96%	378.000,000	95%	367.000,000	100%	378.000,000	100%	2.087.000,000	Sekretariat		
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	1 Unit	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	850.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	33 Unit	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	1.237.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	Sekretariat
Terwujudnya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Meningkatnya kinerja aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Pelayanan publik umum ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	80%	85%	422.810,000	96%	378.000,000	95%	367.000,000	100%	378.000,000	100%	2.087.000,000	Sekretariat		
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	1 Unit	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	100.000,000	1 Unit	850.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	33 Unit	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	254.000,000	33 Unit	1.237.000,000	Sekretariat
			Penyediaan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	40 Stel	31.000,000	-	Sekretariat
Terwujudnya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Meningkatnya kinerja aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Pelayanan publik umum ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur ke. rumah. n. d. ar dan listrik	80%	85%	422.810,000	96%	378.000,000	95%	367.000,000	100%	378.0					

Mewujudkan rasa toleransi antar suku, umat beragama, ras dan golongan	Peningkatkan rasa toleransi antar suku, umat beragama, ras dan golongan	Terhindarnya konflik antar suku, umat beragama, ras dan golongan	Pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan masyarakat budaya yang berkeadilan kebangsaan	75%	80%	1.036.280,000	85%	1.278.044,000	90%	1.521.897,000	95%	1.771.897,000	98%	2.021.897,000	Bid. Ideologi	
			Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah rapat pengurus dan anggota FKUB dengan tokoh agama dan masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	112.500,000	1 Kegiatan	210.084,000	1 Kegiatan	317.065,000	1 Kegiatan	424.065,000	5 Kegiatan	531.814,000	Bid. Ideologi	
			Peningkatan rasa solidaritas dan toleransi di kalangan masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan rasa toleransi di kalangan sosial	1 Kegiatan	1 Kegiatan	204.355,000	1 Kegiatan	238.355,000	1 Kegiatan	279.922,500	1 Kegiatan	320.922,500	5 Kegiatan	369.705,000	Bid. Ideologi	
			Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	-	1 Kegiatan	235.125,000	1 Kegiatan	272.525,000	1 Kegiatan	319.000,000	1 Kegiatan	369,000,000	4 Kegiatan	421,650,000	Bid. Ideologi	
			Pencapaian toleransi dan berkeadilan forum kebangsaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah rapat forum pembauran kebangsaan (75%)	1 Kali	1 Kali	232.700,000	1 Kali	271,080,000	1 Kali	319,285,000	1 Kali	369,285,000	5 Kali	421,150,000	Bid. Ideologi	
Tercapainya kegiatan pendidikan politik dan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berorganisasi dan berkeadilan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkeadilan yang sehat dan demokratis	Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui bidang politik	Pendidikan politik masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Aksi, seperti berpolitik	75%	80%	1.225.460,000	78%	1.278.560,000	82%	1.321.660,000	85%	1.371.660,000	88%	1.421.660,000	Bid. Poldagri	
			Peningkatan politik kepada masyarakat	Jumlah kegiatan tentang partai politik	2 Kegiatan	7 Kegiatan	176.250,000	7 Kegiatan	247,450,000	7 Kegiatan	309,600,000	7 Kegiatan	370,600,000	30 Kegiatan	421,500,000	Bid. Poldagri	
			Peningkatan keparnas partai politik	Jumlah verifikasi dan monitoring bantuan partai	-	12 Kali	282.100,000	12 Kali	310,100,000	12 Kali	340,000,000	12 Kali	370,000,000	48 Kali	421,200,000	Bid. Poldagri	
			Peningkatan kemitraan pemerintah, orpol, ormas dan keadaban lainnya	Jumlah kegiatan kemitraan pengajuan RKT, Renda Lajur ormas dan verifikasi bantuan kemitraan ormas	-	6 Kali	112.200,000	6 Kali	127,800,000	6 Kali	139,000,000	6 Kali	150,000,000	24 Kali	170,000,000	Bid. Poldagri	
			Sosialisasi nilai-nilai demokrasi Indonesia (IDI) di kalangan ulama	Jumlah sosialisasi tentang nilai-nilai demokrasi Indonesia (IDI)	-	1 Kegiatan	176.750,000	1 Kegiatan	204,750,000	1 Kegiatan	233,000,000	1 Kegiatan	267,000,000	4 Kegiatan	301,500,000	Bid. Poldagri	
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, pilpres, pilkada	Jumlah sosialisasi undang-undang pemilihan umum	-	1 Kegiatan	278.100,000	1 Kegiatan	313,460,000	1 Kegiatan	359,460,000	1 Kegiatan	409,460,000	4 Kegiatan	459,960,000	Bid. Poldagri	
							7,484,959,374		7,423,251,906		6,380,943,378		6,452,618,337		36,241,044,995		